JAFM: Journal of Accounting and Finance Management
E-ISSN: 2721-3013
P-ISSN: 2721-3005
https://dinastires.org/JAFM dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jafm.v7i4.3787
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: August 17th 2026 | **Revised:** September 7th 2026 | **Accepted:** September 12th 2026

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Kemandirian Fiskal Sebagai Variabel Moderasi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Eton Eton[1], Nina Febriana Dosinta[2]
[1]Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia, b1031231051@student.untan.ac.id
[2]Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia, nina.febriana.d@ekonomi.untan.ac.id

Corresponding Author: b1031231051@student.untan.ac.id[1]

Abstract: *This study analyzes the effect of regional own-source revenue, general allocation fund, and special allocation fund on capital expenditure, with fiscal independence as a moderating variable, in 14 districts/cities of West Kalimantan Province during 2020-2024. The researcher used a quantitative method utilizing data from the Directorate General of Fiscal Balance. The results show that regional own-source revenue and general allocation fund do not directly affect capital expenditure, while special allocation fund has a positive and significant effect. Fiscal independence is proven to strengthen the effect of regional own-source revenue on capital expenditure, but does not moderate general allocation fund and special allocation fund. This finding constitutes an important novelty, as it demonstrates that the moderating effectiveness of fiscal independence is specific to the characteristics of each revenue source, rather than uniform across all transfer funds.*

Keywords: *Capital Expenditure, Fiscal Independence, General Allocation Fund, Regional Own-Source Revenue, Special Allocation Fund*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal, dengan kemandirian fiskal sebagai variabel moderasi pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2020-2024. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan memanfaatkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh langsung terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan. Kemandirian fiskal terbukti memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, namun tidak memoderasi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Temuan ini menjadi kebaruan penting karena membuktikan bahwa efektivitas moderasi kemandirian fiskal bersifat spesifik menurut karakteristik masing-masing sumber penerimaan, bukan berlaku seragam pada seluruh dana transfer.

Kata Kunci: Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Kemandirian Fiskal Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Rendahnya alokasi belanja modal masih menjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Belanja modal berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Purnasari et al., 2022). Namun, pada Provinsi Kalimantan Barat proporsi belanja modal tahun 2024 hanya mencapai 16,40% dari total APBD, masih jauh di bawah amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menetapkan alokasi belanja infrastruktur minimal 40% dari total APBD. Belanja pegawai masih mendominasi pengeluaran daerah, bahkan melebihi batas maksimal 30% dari APBD, sehingga ruang fiskal untuk belanja modal semakin terbatas. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah yang berada pada kategori "konsultatif" dengan rasio 26,74%, serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat sebesar 78,68% (Indrawan et al., 2024; UU Nomor 1 Tahun 2022).

Persoalan rendahnya kemandirian fiskal dan tingginya ketergantungan transfer bukan hanya terjadi di Kalimantan Barat, tetapi juga ditemukan pada daerah lain di Indonesia Timur; Kabupaten Maluku Tenggara misalnya, tercatat memiliki rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata hanya 6,60% dengan pola hubungan yang bersifat instruktif selama periode 2019-2023 (Toamain et al., 2025), yang mengindikasikan bahwa persoalan ini merupakan tantangan fiskal daerah yang bersifat struktural dan relatif meluas di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, kajian pada level provinsi Kalimantan Barat juga menunjukkan bahwa belanja modal belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, sedangkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan justru terbukti berpengaruh signifikan (Seviana et al., 2025), sehingga semakin menegaskan pentingnya memahami determinan yang mendorong optimalisasi belanja modal itu sendiri.

Kajian empiris tentang determinan belanja modal menghasilkan temuan yang inkonsisten. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh positif dan signifikan (Putranto, 2023), namun tidak berpengaruh signifikan di daerah lain (Purnasari et al., 2022). Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan hasil serupa, berpengaruh positif di beberapa daerah (Susanto & Kartika Berliani, 2024), namun tidak berpengaruh signifikan di daerah lain (Aulia Devi & Tjahjono, 2023). Demikian juga Dana Alokasi Khusus (DAK), berpengaruh positif dan signifikan (Putri & Mauliyah, 2022), namun tidak berpengaruh signifikan di daerah lain (Lovyana & Nursiam, 2025). Inkonsistensi temuan ini mengindikasikan adanya variabel kondisional yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Dalam perspektif teori agensi dan *flypaper effect,* tingkat kemandirian fiskal diduga menjadi faktor yang memperkuat atau memperlemah pengaruh ketiga sumber penerimaan tersebut terhadap belanja modal (Rahayu & Jaeni, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengisi celah yang belum terjawab dalam literatur. Penelitian terdahulu, seperti Putranto (2023), menguji pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal di Kalimantan Barat pada periode 2017-2021, namun belum menguji DAK maupun peran moderasi, serta belum mencakup dinamika pasca-COVID-19. Rahayu dan Jaeni (2025) menguji peran moderasi kemandirian fiskal di Jawa Tengah, tetapi moderasi tersebut diuji secara agregat sehingga tidak dapat mengidentifikasi sumber penerimaan mana yang paling dikondisikan oleh kemandirian fiskal. Susanto dan Kartika Berliani (2024) meneliti PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal di Jawa Barat, namun tidak mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai variabel kondisional. Lovyana dan Nursiam (2025) meneliti pemerintah provinsi di Indonesia secara umum tanpa mengeksplorasi konteks daerah dengan ketergantungan transfer yang sangat tinggi.

Penelitian ini berkontribusi pada tiga aspek kebaruan. Pertama, kemandirian fiskal diuji sebagai pemoderasi secara terpisah pada masing-masing sumber penerimaan (PAD, DAU, dan DAK), berbeda dari Rahayu dan Jaeni (2025) yang mengujinya secara agregat sehingga memungkinkan identifikasi yang lebih presisi mengenai variabel penerimaan mana yang efektivitasnya paling dikondisikan oleh kemandirian fiskal. Kedua, penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang belum pernah diteliti dengan pendekatan moderasi ini, dan relevan karena memiliki tingkat ketergantungan transfer sangat

tinggi serta kemandirian fiskal sangat rendah. Ketiga, data periode 2020-2024 mencakup dinamika pemulihan fiskal pasca pandemi COVID-19, sehingga temuan yang dihasilkan lebih relevan dengan kondisi terkini pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan: sejauh mana pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal, serta bagaimana peran moderasi kemandirian fiskal, pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2020-2024? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal dengan kemandirian fiskal sebagai variabel moderasi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2020-2024.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Rizki et al. (2025) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak antara prinsipal sebagai pemberi wewenang dan agen sebagai pelaksana. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemerintah pusat dan masyarakat berperan sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen yang diberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk PAD, DAU, dan DAK sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah (Sania et al., 2024).

Teori *flypaper effect* yang dikemukakan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) dalam Apriliani et al. (2025) menyatakan bahwa pengaruh dana transfer terhadap belanja daerah lebih dominan dibandingkan PAD (Rafi & Arza, 2023). Daerah dengan kemandirian fiskal rendah cenderung menggunakan DAU dan DAK untuk menutup belanja operasional sehingga dampaknya terhadap belanja modal menjadi tidak optimal. Sebaliknya, daerah dengan kemandirian fiskal tinggi mampu mengarahkan dana transfer pada belanja modal yang produktif karena kebutuhan operasional telah dipenuhi melalui PAD (Ramadhani et al., 2025).

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, mencakup pengadaan aset berwujud seperti tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, serta infrastruktur lainnya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023). Belanja modal menjadi indikator utama komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan dan peningkatan layanan publik yang berkelanjutan (Pratama et al., 2025).

PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 1 Tahun 2022). PAD mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang berperan strategis dalam mendukung pembangunan dan menentukan arah kebijakan pengeluaran daerah (Pane et al., 2021).

DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *block grant* sehingga penggunaannya diserahkan kepada masing-masing daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhannya (Aprilivia & Praptoyo, 2024).

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional. Dalam pelaksanaannya, DAK bersifat *specific grant* dan terikat pada bidang tertentu (Marliana et al., 2022).

Kemandirian fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (S. A. Putra et al., 2024). Kemandirian fiskal yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menetapkan alokasi belanja modal.

Semakin besar PAD yang diterima, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja modal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini didukung oleh Febriyanti dan Dewi (2024) serta Alpi dan Sirait (2022) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Temuan serupa dikemukakan oleh Aprilivia dan Praptoyo (2024) yang juga menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota,

sejalan dengan fleksibilitas penggunaan PAD yang dapat diarahkan sesuai prioritas pembangunan daerah. H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

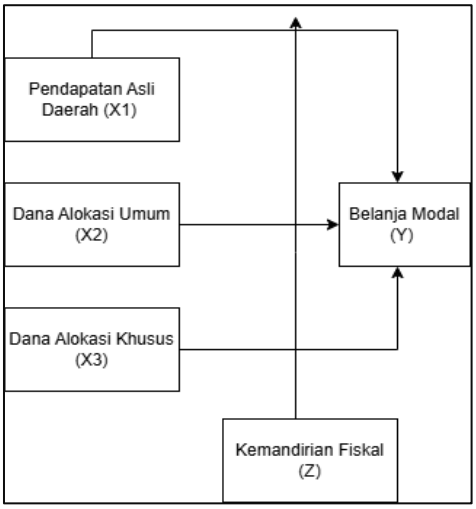
Semakin besar DAU yang diterima, semakin besar pula kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan melalui pengadaan infrastruktur dan aset tetap. Penelitian Susanto dan Kartika Berliani (2024) serta Alpi dan Sirait (2023) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Peningkatan DAK dapat memperbesar kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sarana, prasarana, dan aset tetap, sehingga berpotensi meningkatkan alokasi belanja modal. Murti dan Trisnawati (2021) serta Soesilo dan Asyik (2021) menunjukkan bahwa semakin tinggi DAK yang diterima, maka semakin tinggi pula besarnya belanja modal. H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Daerah dengan kemandirian fiskal tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan PAD ke belanja modal karena tidak terlalu bergantung pada dana transfer yang bersifat kondisional, sehingga diskresi kepala daerah sebagai agen untuk mengoptimalkan PAD bagi belanja produktif semakin luas (Rizki et al., 2025). Rahayu dan Jaeni (2025) membuktikan kemandirian fiskal memperkuat hubungan positif antara PAD dan belanja modal di Jawa Tengah. H4: Kemandirian fiskal memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal.

Daerah dengan kemandirian fiskal tinggi lebih mampu mengoptimalkan DAU sebagai suplemen belanja modal karena kebutuhan operasional telah terpenuhi melalui PAD, sehingga DAU dapat diarahkan pada belanja produktif sejalan dengan teori *flypaper effect* (Ramadhani et al., 2025). Andrianda dan Rosada (2024) membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah, semakin efektif pula DAU diarahkan pada belanja modal. Rahayu dan Jaeni (2025) juga membuktikan bahwa kemandirian fiskal memperkuat efektivitas dana transfer terhadap belanja modal. H5: Kemandirian fiskal memperkuat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal.

Daerah dengan kemandirian fiskal tinggi umumnya memiliki kapasitas administrasi dan kelembagaan yang lebih baik dalam menyerap DAK secara optimal dan merealisasikannya menjadi belanja modal yang produktif (Rizki et al., 2025). Hal ini diperkuat oleh Yulkhaq dan Amiranto (2024) serta Indrianingrum dan Priyono (2023) yang membuktikan DAK berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, mengindikasikan bahwa hubungan DAK dan kemandirian fiskal bersifat saling memperkuat, sehingga daerah yang lebih mandiri secara fiskal akan lebih efektif mengarahkan DAK pada belanja modal produktif. H6: Kemandirian fiskal memperkuat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Populasi sekaligus sampel terdiri atas 12 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2020-2024. Pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh (sensus), sehingga total unit observasi yang digunakan sebanyak 70 (14 kabupaten/kota x 5 tahun).

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Simbol	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
Belanja Modal	BM	Total pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi	Total realisasi belanja modal	Miliar Rp
Pendapatan Asli Daerah	PAD	Pendapatan yang diperoleh dari pajak, retribusi, hasil kekayaan, dan lain-lain PAD yang sah	Total realisasi PAD	Miliar Rp
Dana Alokasi Umum	DAU	Dana transfer untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah	Total realisasi DAU	Miliar Rp
Dana Alokasi Khusus	DAK	Dana transfer untuk mendanai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional	Total realisasi DAK	Miliar Rp
Kemandirian Fiskal	KF	Kemampuan daerah membiayai kegiatan secara mandiri tanpa ketergantungan transfer	KF = PAD / (Pendapatan transfer pusat + Pinjaman) x 100%	Persen (%)

Sumber: Diolah dari berbagai referensi (2026)

Analisis data dilakukan dengan metode regresi data panel menggunakan perangkat lunak EViews 12, meliputi uji statistik deskriptif, pemilihan model estimasi, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, dan pengujian hipotesis. Seluruh variabel ditransformasikan ke dalam logaritma natural (Ln) untuk menstabilkan data dan mereduksi disparitas antarwilayah. Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Model 1 - Pengaruh Langsung: $LnBM_{it} = \alpha + \beta_1 LnPAD_{it} + \beta_2 LnDAU_{it} + \beta_3 LnDAK_{it} + \varepsilon_{it}$

Model 2 - Moderated Regression Analysis (MRA): $LnBM_{it} = \alpha + \beta_1 LnPAD_{it} + \beta_2 LnDAU_{it} + \beta_3 LnDAK_{it} + \beta_4 KF_{it} + \beta_5 (LnPAD \times KF)_{it} + \beta_6 (LnDAU \times KF)_{it} + \beta_7 (LnDAK \times KF)_{it} + \varepsilon_{it}$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian, meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel yang diteliti.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	70	92,85000	670,4800	251,3271	124,0327
PAD	70	30,87000	593,7800	151,2026	120,3178
DAU	70	444,9100	1.161,360	694,2301	190,9565
DAK	70	91,31000	612,3800	256,3383	109,1467
KF	70	0,035484	0,563887	0,136813	0,124041
Valid N (Listwise)	70				

Sumber: Output Eviews, diolah (2026)

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel belanja modal (BM) memiliki nilai rata-rata Rp251,33 miliar dengan standar deviasi Rp124,03 miliar. Rata-rata PAD sebesar Rp151,20 miliar, DAU sebesar Rp694,23 miliar, dan DAK sebesar Rp256,34 miliar. Kemandirian fiskal rata-rata hanya 13,68%, mengindikasikan bahwa kabupaten/kota di Kalimantan Barat masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Rata-rata DAU yang jauh lebih besar dibandingkan PAD mencerminkan tingginya ketergantungan fiskal

kabupaten/kota di Kalimantan Barat terhadap dana transfer pemerintah pusat. Nilai kemandirian fiskal juga menunjukkan variasi yang cukup lebar antardaerah, dari 3,55% hingga 56,39%.

Pemilihan Model Estimasi

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model estimasi yang lebih tepat antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.912695	(13,52)	0.0000
Cross-section Chi-square	63.526529	13	0.0000

Sumber: Output Eviews, diolah (2026)

Berdasarkan tabel 3, nilai probabilitas sebesar 0,0000 < α = 0,05, sehingga H_0 ditolak dan Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan Common Effect Model (CEM).

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model estimasi yang lebih tepat antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section random	13.461909	4	0.0092

Sumber: Output Eviews, diolah (2026)

Hasil Uji Hausman pada Tabel 4 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0092 < 0,05, sehingga H_0 ditolak dan FEM dikonfirmasi lebih tepat digunakan dibandingkan REM.

c. Uji Lagrange Multiplier (Breusch-Pagan)

Uji Lagrange Multiplier (LM) Breusch-Pagan turut disajikan sebagai robustness check atas pemilihan model, khususnya untuk mendeteksi ada tidaknya efek individu yang signifikan dalam data panel.

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier (Breusch-Pagan)

Statistic	Prob.
8,598620	0.0034

Sumber: Output Eviews, diolah (2026)

Hasil uji LM menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0034 < 0,05, yang mengonfirmasi keberadaan efek individu yang signifikan dalam data panel, sehingga semakin memperkuat keputusan penggunaan Fixed Effect Model (FEM) dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	Probability
0.080568	0.960517

Sumber: Output Eviews, diolah (2026)

Nilai probabilitas sebesar 0,960517 > 0,05 sehingga H_0 diterima dan disimpulkan bahwa residual model berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-0.041146	2.347028	-0.017531	0.9861
PAD	0.336305	0.186808	1.80027	0.0776
DAU	-0.137672	0.414740	-0.331948	0.7413
DAK	-0.037700	0.124400	-0.303055	0.7631
KF	-1.771980	0.995156	-1.780606	0.0808

Sumber: Output Eviews, diolah (2026)

Seluruh variabel memiliki nilai p-value di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Centered VIF
PAD	7.584121
DAU	2.469572
DAK	3.607788
KF	6.355011

Sumber: Output Eviews, diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, seluruh nilai centered VIF variabel berada di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Model	R-squared	Adjusted R-squared
1	0.805656	0.746986
2	0.858102	0.800185

Sumber: Output Eviews, diolah (2026)

Adjusted R-squared sebesar 0,7470 berarti PAD, DAU, dan DAK mampu menjelaskan variasi belanja modal sebesar 74,70%. Setelah penambahan variabel moderasi, Adjusted R-squared meningkat menjadi 0,8002, mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal sebagai pemoderasi memberikan kontribusi tambahan yang bermakna dalam menjelaskan variasi belanja modal sebesar 80,02%.

Regresi Data Panel

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Data Panel - Pengaruh Langsung (Model 1)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	5.952250	3.076464	1.934770	0.0584
Ln PAD	0.097934	0.184658	0.530353	0.5981
Ln DAU	-0.537799	0.538794	-0.998153	0.3227
Ln DAK	0.459795	0.162383	2.831552	0.0065

Sumber: Output Eviews, diolah (2026)

Tabel 10 menyajikan hasil estimasi Fixed Effect Model untuk Model 1. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh persamaan regresi: Ln BM = 5,952250 + 0,097934 Ln PAD - 0,537799 Ln DAU + 0,459795 Ln DAK. Hasil ini menunjukkan bahwa hanya DAK yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (p = 0,0065), sementara PAD (p = 0,5981) dan DAU (p = 0,3227) tidak berpengaruh signifikan pada Model 1.

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Data Panel - Moderated Regression Analysis (Model 2)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.61105	3.887095	2.729816	0.0088
Ln PAD	0.653661	0.235120	2.780111	0.0077
Ln DAU	-1.535405	0.674207	-2.278834	0.0271
Ln DAK	0.498690	0.218839	2.278789	0.0271
KF	-32.92596	15.54876	-2.117594	0.0393
KF x Ln PAD	3.493007	1.404118	2.487688	0.0163
KF x Ln DAU	2.510503	3.101636	0.809413	0.4222
KF x Ln DAK	-1.699895	1.623890	-1.046805	0.3003

Sumber: Output Eviews, diolah (2026)

Tabel 11 menyajikan hasil estimasi Fixed Effect Model untuk Model 2 (Moderated Regression Analysis). Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh persamaan regresi: Ln BM = 10,61105 + 0,653661 Ln PAD - 1,535405 Ln DAU + 0,498690 Ln DAK - 32,92596 KF + 3,493007 (KF×Ln PAD) + 2,510503 (KF×Ln DAU) - 1,699895 (KF×Ln DAK). Dibandingkan dengan Model 1, koefisien Ln PAD meningkat dari 0,097934 menjadi 0,653661 setelah dimasukkannya variabel moderasi kemandirian fiskal beserta interaksinya. Interaksi KF dengan Ln PAD (KF×Ln PAD) menunjukkan koefisien positif dan signifikan (p = 0,0163), mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal. Sebaliknya, interaksi KF dengan Ln DAU dan Ln DAK masing-masing tidak signifikan (p = 0,4222 dan p = 0,3003), menunjukkan bahwa kemandirian fiskal belum terbukti memoderasi pengaruh kedua sumber penerimaan tersebut terhadap belanja modal.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

H1 ditolak. Hasil Uji t pada Model 1 (Tabel 10) menunjukkan bahwa PAD memiliki koefisien sebesar 0,097934 dengan nilai probabilitas sebesar 0,5981 (p > 0,05), sehingga PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil ini tidak sejalan dengan prediksi teori agensi yang mengasumsikan bahwa kepala daerah sebagai agen akan mengalokasikan PAD untuk memenuhi kebutuhan publik, termasuk belanja modal, guna memaksimalkan kesejahteraan masyarakat selaku prinsipal. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh karakteristik fiskal Kalimantan Barat yang khas, di mana berdasarkan data Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023, rasio desentralisasi fiskal konsolidasi kabupaten/kota di Kalimantan Barat hanya berada di angka 13,49%, jauh di bawah rata-rata nasional. Selain itu, realisasi APBD konsolidasi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pendapatan transfer mendominasi hingga 86,37% dari total pendapatan kabupaten/kota, sehingga ruang PAD untuk dialokasikan ke belanja modal menjadi sangat terbatas. Dengan proporsi PAD yang kecil tersebut, sebagian besar terserap untuk membiayai belanja operasional dan belanja pegawai yang bersifat wajib, sehingga tidak tersisa ruang fiskal yang memadai untuk belanja modal (T. S. A. Putra, 2023). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Purnasari et al. (2022) serta Akbar et al. (2022) yang menunjukkan bahwa PAD tidak selalu mampu mendorong peningkatan belanja modal, terutama di daerah yang proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif kecil.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

H2 ditolak. Hasil Uji t pada Model 1 (Tabel 10) menunjukkan bahwa DAU memiliki koefisien negatif sebesar -0,537799 dengan nilai probabilitas sebesar 0,3227 (p > 0,05), sehingga DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat dijelaskan bahwa DAU sebagai *block grant* memberikan keleluasaan kepala daerah untuk menggunakannya pada belanja operasional dan belanja pegawai, bukan untuk investasi infrastruktur. Kondisi ini konsisten dengan rata-rata kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang hanya sebesar 13,68% sehingga DAU lebih banyak difungsikan sebagai penyangga belanja rutin pemerintahan daripada sebagai pendorong belanja

modal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nurwahiddah dan Setiawati (2025) serta Aulia Devi dan Tjahjono (2023) yang menemukan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

H3 diterima. Hasil Uji t pada model 1 (Tabel 10) menunjukkan bahwa DAK memiliki koefisien positif sebesar 0,459795 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0065 ($p < 0,05$), sehingga DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. DAK sebagai *specific grant* terikat pada bidang tertentu, sehingga tidak dapat dialihkan ke belanja operasional. Berbeda dengan PAD dan DAU yang rentan terserap untuk belanja pegawai, DAK dengan rata-rata Rp256,34 miliar per kabupaten/kota dalam penelitian ini memiliki mekanisme pelaporan yang ketat dan sanksi atas ketidakpatuhan dari pemerintah pusat selaku prinsipal. Kondisi ini selaras dengan teori *flypaper effect* dan teori agensi, di mana pengawasan ketat pemerintah pusat selaku prinsipal mendorong kepala daerah selaku agen untuk mengalokasikan DAK sesuai peruntukannya. Temuan ini sejalan dengan Nurwahiddah dan Setiawati (2025) serta Priyono dan Khotimah (2023).

Kemandirian Fiskal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

H4 diterima. Hasil Uji t pada Model 2 (Tabel 11) menunjukkan bahwa interaksi kemandirian fiskal dengan PAD memiliki koefisien positif sebesar 3,493007 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0163 ($p < 0,05$), sehingga kemandirian fiskal terbukti memoderasi dan memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal. Temuan ini juga didukung oleh perubahan status pengaruh PAD itu sendiri, dari tidak signifikan Pada Model 1 ($p = 0,5981$) menjadi signifikan pada Model 2 ($p = 0,0077$), yang mengindikasikan bahwa PAD sesungguhnya memiliki potensi mendorong belanja modal, namun potensi tersebut baru dapat terealisasi secara optimal ketika daerah memiliki kemandirian fiskal yang memadai. Pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan rata-rata kemandirian fiskal hanya 13,68%, PAD cenderung terserap untuk menutup kebutuhan operasional yang mendesak. Sebaliknya, ketika kemandirian fiskal meningkat, kepala daerah sebagai agen memiliki ruang diskresi lebih luas untuk mengarahkan PAD ke belanja modal, sejalan dengan teori agensi (Rizki et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan Rahayu dan Jaeni (2025) yang membuktikan bahwa kemandirian fiskal memoderasi dan memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Kemandirian Fiskal Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

H5 ditolak. Hasil Uji t pada Model 2 (Tabel 11) menunjukkan bahwa interaksi kemandirian fiskal dengan DAU memiliki koefisien sebesar 2,510503 dengan nilai probabilitas sebesar 0,4222 ($p > 0,05$), sehingga Kemandirian fiskal tidak terbukti memoderasi pengaruh DAU terhadap belanja modal. Meskipun DAU mencatat rata-rata tertinggi yaitu Rp694,23 miliar, besarnya DAU justru tidak mampu mendorong belanja modal. Permasalahan mendasar terletak pada sifat DAU sebagai *block grant* yang memberikan keleluasaan kepala daerah untuk mengalokasikannya pada belanja pegawai dan operasional yang lebih mendesak. Moderasi kemandirian fiskal tidak efektif mengubah pola alokasi DAU ke arah belanja modal karena rata-rata kemandirian fiskal Kalimantan Barat (13,68%) jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah, wilayah yang diteliti Rahayu dan Jaeni (2025) dengan hasil berbeda.

Kemandirian Fiskal Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

H6 ditolak, dan hal ini memperkuat konsistensi temuan H3. Hasil Uji t pada Model 2 (Tabel 11) menunjukkan bahwa interaksi kemandirian fiskal dengan DAK memiliki koefisien negatif sebesar -1,699895 dengan nilai probabilitas sebesar 0,3003 ($p > 0,05$), sehingga DAK tidak memerlukan moderasi kemandirian fiskal untuk mendorong belanja modal karena

sifatnya sebagai *specific grant* yang terikat ketat telah menempel langsung pada pos belanja modal tanpa dipengaruhi oleh kemandirian fiskal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa DAK fisik digunakan khusus untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana layanan publik. Temuan ini didukung oleh Nurwahiddah dan Setiawati (2025) yang membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal secara langsung tanpa moderasi variabel lain.

Secara keseluruhan, temuan-temuan di atas menegaskan *novelty* penelitian ini, yaitu bahwa peran kemandirian fiskal sebagai pemoderasi bersifat spesifik menurut karakteristik masing-masing sumber penerimaan: kemandirian fiskal hanya efektif memoderasi PAD yang bersifat diskresioner, namun tidak relevan bagi DAU dan DAK yang pola penggunaannya masing-masing sudah ditentukan oleh sifat *block grant* dan *specific grant*.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal dengan kemandirian fiskal sebagai variabel moderasi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2020-2024 menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan PAD dan DAU tidak berpengaruh signifikan. Kemandirian fiskal terbukti memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal, namun tidak mampu memoderasi pengaruh DAU dan DAK. Secara teoritis, temuan ini memperkuat relevansi teori *flypaper effect* dalam menjelaskan efektivitas DAK sebagai *specific grant*, sekaligus membuktikan bahwa teori agensi berlaku kondisional tergantung tingkat kemandirian fiskal daerah. Secara praktis, pemerintah pusat perlu mempertahankan mekanisme kondisionalitas DAK agar belanja modal tetap terjaga, sementara pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kemandirian fiskal sebagai prasyarat agar PAD dapat dioptimalkan untuk belanja modal yang produktif.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki Keterbatasan pada cakupan wilayah terbatas pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan periode pengamatan 2020-2024, sehingga generalisasi hasil ke provinsi lain perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian ini juga hanya menggunakan empat variabel utama (PAD, DAU, DAK, dan kemandirian fiskal), sehingga faktor-faktor lain yang turut memengaruhi belanja modal belum tercakup dalam model. Keterbatasan lain juga muncul dari sisi literatur pendukung, di mana penelitian yang secara khusus menguji kemandirian fiskal sebagai variabel moderasi pada masing-masing sumber penerimaan daerah (PAD, DAU, dan DAK) secara terpisah masih sangat terbatas jumlahnya, sehingga peneliti menghadapi kendala dalam memperoleh studi pembanding yang relevan untuk memperkuat temuan penelitian ini, khususnya pada hasil H5 dan H6 yang menunjukkan bahwa kemandirian fiskal tidak memoderasi pengaruh DAU dan DAK.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dengan mereplikasi model penelitian ini pada provinsi lain dengan tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi guna menguji konsistensi peran moderasi kemandirian fiskal, memperpanjang periode pengamatan, serta menambahkan variabel lain seperti Dana Bagi Hasil (DBH) atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk memperoleh model yang lebih komprehensif.

REFERENSI

Akbar, D., Murtala, M., & Asnawi, A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, *5*(1), 30. https://doi.org/10.29103/jeru.v5i1.7918

Alpi, M. F., & Sirait, R. F. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.

Andrianda, Y., & Rosada, A. (2024). Pengaruh DBH, DAU, DAN DAK Terhadap Tingkat Kemandirian Provinsi Sumatera Selatan. *SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN*

Apriliani, D. M., Fitrijanti, T., & Aryana, K. P. (2025). Flypaper effect di Pulau Jawa : Pengaruh pendapatan asli daerah dan transfer ke daerah terhadap belanja daerah dengan moderasi pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, *5*(5), 2518–2537.

Aprilivia, I. R., & Praptoyo, S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *4*(2), 12–22. https://doi.org/10.26740/independent.v4i2.60998

Aulia Devi, A., & Tjahjono, A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *3*(3), 1104–1126. https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i3.778

Febriyanti, K. W., & Dewi, N. A. W. T. (2024). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, *7*(3), 1255. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05

Indrawan, A., Rifai, A., Setiono, G., Paramita, A., Kinantya, D., Wiranti, S., & Idam, E. (2024). Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Barat Edisi Tahun 2024. In *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/data-publikasi/publikasi-cetak/4495-kfr-triwulan-iv-tahun-2024.html

Indrianingrum, H., & Priyono, N. (2023). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magelang pada Tahun 2006 – 2021. *JURNAL ECONOMINA Volume 2, Nomor 1*, *2*(1–12).

Lexi Seviana, E., Eka Putri, N., & Umyana, A. (2025). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Perkapita Pada Provinsi Kalimantan Barat. *Journal of Accounting and Finance Management*, *6*(4), 2120–2128. https://doi.org/10.38035/jafm.v6i4.2217

Lovyana, & Nursiam. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Indonesian Journal of Digital Business*, *5*(4), 1948–1962.

Marliana, R., Slamet, A., & Yulianto, P. D. (2022). Pengaruh PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *2*(2), 620–640.

Murti, S., & Trisnawati, R. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, dan DAK Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Perspektif Akuntansi*, *4*(2), 2623–0186. http://ejournal.uksw.edu/persi

Nurwahiddah, A., & Setiawati, E. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Indonesian Journal of Digital Business*, *5*(4), 2601–2616.

Pane, Y., Simarmata, A. M., Rezeki, S., Rinaldi, M., & Panggabean, F. Y. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, *5*(2), 31–44. https://doi.org/10.38043/jids.v5i2.3182

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, Pub. L. 62 (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Details/254789/pmk-no-62-tahun-2023

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, Pub. L. 37 (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Details/256399/pp-no-37-

tahun-2023

Pratama, N. S., Hamzani, U., Muhsin, M., Rusliyawati, R., & Karpriana, A. P. (2025). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, *4*(1), 16–26. https://doi.org/10.56916/jimab.v4i1.1080

Priyono, I. A., & Khotimah, H. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota Jawa Timur Tahun 2019-2021. *Trilogi Accounting and Business Research*, *4*(2), 235–245. https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/TABR/article/download/1802/07_1802

Purnasari, N., Sitompul, E., & Laowo, D. K. (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2019. *Owner*, *6*(2), 1412–1425. https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.765

Putra, S. A., Riyanto, V., Supartono, A. R., Emmanuel, J., Hagi, I. A., & Nurfauzi, M. A. (2024). Relevansi kemadirian Fiskal Daerah: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, *4*(1), 17–28.

Putra, T. S. A. (2023). *Kinerja APBN Kalimantan Barat Semester I-2023 Tetap Solid dan Terjaga Positif*. KEMENTERIAN KEUANGAN. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-pengumuman/1432/Kinerja-APBN-Kalimantan-Barat-Semester-I-2023-Tetap-Solid-dan-Terjaga-Positif.html

Putranto, G. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021. *Journal Of Social Science Research*, *2*(1), 951–964.

Putri, E. S., & Mauliyah, N. I. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2018-2020). *Asersi: Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, *2*(2), 108. https://publikasi.polije.ac.id/asersi/article/view/3603

Rafi, R. N., & Arza, F. I. (2023). Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera . *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, *5*(1), 1207–1223.

Rahayu, T. S., & Jaeni. (2025). The Impact of Regional Own-Source Revenue and Intergovernmental Transfer Funds on Capital Expenditures With Independence Ratio As a Moderating Variable: An Empirical Study on Regency/Municipality Governments in Central Java Province From 2020 To 2023. *Journal of Economic, Business, and Accounting*, *8*, 1995–2015.

Ramadhani, M. W., Utami, S., Majiding, N. C., & Akib, A. (2025). Flypaper Effect dan Kapasitas Fiskal Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. *Jurnal Liabilitas*, *10*(2), 121–130. https://doi.org/10.54964/liabilitas.v10i2.510

Rizki, M., Yahya, M. R., & Rahmawaty, R. (2025). The Role of Fiscal Revenue and Special Allocation Funds in Capital Expenditure: Evidence from Aceh Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, *10*(4), 715–728.

Sania, N., Yamin, N. Y., Paranoan, S., & Tanra, A. A. M. (2024). Dampak Dana Transfer Dan Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, *9*(1), 247–261. https://doi.org/10.29303/jaa.v9i1.487

Santhy Toamain, A., Siaila, S., & Richy Pattiruhu, J. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Maluku Tenggara. *Journal of Accounting and Finance Management*, *6*(4), 2294–2303. https://doi.org/10.38035/jafm.v6i4.2546

Soesilo, A. F., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*

Susanto, B. kris A., & Kartika Berliani. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2022). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, *10*(4), 2732–2739. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2914

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. 1 (2022). https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no1-tahun-2022

Yulkhaq, M. Z. F., & Amiranto, J. B. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Derah. Gemah Ripah: Jurnal Bisnis